

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bitzinger, Richard A., (2009). *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. California: ABC CLIO.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Burchill, S. (2005). *The national interest in international relations theory*. Springer.

Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan dan Isu-isu Strategis Global*. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Burhanuddin (2019). *Kajian Pasifik Barat Daya*. Makassar: Unhas Press.

Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).

Hartanto, A. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. (2005) *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015) *Indonesia Defence White Paper*

Olton, R, Plano J.C. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A Bardin.

Widjayanto, A. (2012). *Kemandirian Industri Pertahanan*. Jakarta: Kompas.

Jurnal:

Al-Fadhat, F., & Effendi, N. N. A. Kerja sama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373-392.

Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, H. B. (2016). Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX. *Global Strategis*, 10(1), 75-94.

- Bitzinger, R. A. (2017). Southeast Asia's naval shipbuilding industry: Challenges ahead. *Singapore: RSIS Publication*.
- Clackson, A. (2011). Conflict and cooperation in international relations. *E-International Relations*, <http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-internationalrelations/>(30.11.2017).
- Dunne, J. P., & Sköns, E. (2010). The military industrial complex. *The Global Arms Trade: A Handbook*. London: Routledge London, 281-292.
- Grizold, A. (1994). The concept of national security in the contemporary world. *International Journal on World Peace*, 37-53.
- Manafe, C., Swastanto, Y., & Pedrason, R. (2020). INDONESIA AND SOUTH KOREA DEFENSE DIPLOMACY: CASE STUDY OF PROCUREMENT OF CHANG BOGO CLASS VESSELS IN 2010-2018. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 162-173.
- Milner, H. (1992). International theories of cooperation among nations: Strengths and weaknesses.
- Mintz, A. (1985). The military-industrial complex: American concepts and Israeli realities. *Journal of Conflict Resolution*, 29(4), 623-639.
- Moskos Jr, C. C. (1974). The concept of the military-industrial complex: radical critique or liberal bogey?. *Social Problems*, 21(4), 498-512.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Nurrohman, I., Gunawan, D., & Sumarlan, S. (2019). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Implementasi Kebijakan Kerja Sama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan. *Diplomasi Pertahanan*, 5(1).
- Paulo, S. (2014). International cooperation and development: A conceptual overview. *German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Discussion Paper*, 13.
- Poetri, D. A., Govindasamy, G., & Akhir, M. N. M. (2018). Republic of Korea-Indonesia Relations: Middle Power Diplomacy in East Asia. *IJEAS: The International Journal of East Asian Studies*, 7(1), 59-77.

Prasetyo, T., Armawi, A., & Salim, D. A. (2017). Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerja sama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 86-103.

Rundquist, B. S. (1978). On testing a military industrial complex theory. *American Politics Quarterly*, 6(1), 29-53.

Wicaksono, T., & Perwita, A. A. B. (2020). The Military Industrial Complex In a Developing Country: Lessons from the Republic of Turkey. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 53-67.

Skripsi:

Bustaman, A. I. (2019). Peranan PT. PINDAD Dalam Pengembangan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Artikel:

Putera, E.W. (2018). Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Retrieved from <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/#:~:text=Dalam%20konstitusi%20tersebut%2C%20kepentingan%20nasional,kemerdekaan%2C%20perdamaian%20abadi%20dan%20keadilan>

Tim Detik.com-Detikfinance. (2020). Sebesar Apa Anggaran Kemhan RI dibanding Negara Tetangga?. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5099470/sebesar-apa-anggaran-kemhan-ri-dibanding-negara-tetangga>

Saubani, A. (2020). Anggaran (Besar) Pertahanan untuk Kementerian Prabowo. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qh871d409/anggaran-besar-pertahanan-untuk-kementerian-prabowo>

Website:

Bab 7. https://www.bappenas.go.id/files/4913/5078/6556/bab-7_20090202204616_1756_8.pdf

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

KERJA SAMA INDONESIA – KOREA SELATAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA INDONESIA

Oleh:

Muh. Andika Marsiyandi Arafah

(Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin)

Abstract

This study aims to determine the interests of Indonesia and South Korea in cooperation in the defense sector and their impact on the independence of the main tools of the Indonesian weapon system. To achieve this goal, the research method used is descriptive analytical using data obtained through library research and online interviews. In analyzing the data, qualitative analysis techniques were used.

The results of this study indicate that Indonesia's interests are the pursuit of the independence of the defense equipment system, while South Korea wants to promote and market the defense equipment in its country. The effect of the cooperation between Indonesia and South Korea on the independence of Indonesia's defense equipment is quite influential where Indonesia succeeded in building its first submarine and contributed to the increase in technology readiness level of Indonesia by two levels in its aerospace industry.

Keywords: defense equipment, defense industry, cooperation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Indonesia dan Korea Selatan dalam kerja sama di bidang pertahanan serta dampaknya terhadap kemandirian alat utama sistem senjata Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara secara daring. Dalam menganalisis data tersebut, digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia adalah pengejaran terhadap kemandirian alutsista, sementara Korea Selatan ingin memajukan dan memasarkan alutsista dalam negerinya. Pengaruh kerja sama Indonesia – Korea Selatan terhadap kemandirian alutsista Indonesia cukup berpengaruh dimana Indonesia berhasil membangun kapal selam pertamanya serta berkontribusi terhadap peningkatan *technology readiness level* Indonesia sebanyak dua level pada industri kedirgantaraannya.

Kata Kunci: alutsista, industri pertahanan, kerja sama

PENDAHULUAN

Salah satu kunci pertahanan dan keamanan Indonesia terletak pada kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme TNI melalui pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI (Bappenas). Peran alutsista sangat vital untuk menjaga keamanan negara dari ancaman negara lain, sehingga pemenuhan akan kebutuhan alutsista menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh suatu negara.

Upaya pemenuhan kebutuhan alutsista dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan memproduksinya sendiri dengan memanfaatkan industri pertahanan nasional yang dimiliki, serta dengan cara membeli dari negara lain. Selama ini, Indonesia masih mengandalkan pengadaan alutsista dengan cara membelinya dari negara lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya alutsista utama seperti pesawat tempur, kapal perang, dan *main battle tank* yang dibeli dari negara lain. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rawan terhadap embargo dari negara produsen alutsista tersebut. Seperti yang terjadi pada periode 1995-2005 ketika Indonesia diembargo oleh Amerika Serikat akibat konflik Timor-timor, dan berakibat kemerosotan signifikan terhadap kekuatan tempur alutsista Indonesia.

Dengan luasnya teritori darat maupun laut yang dimiliki oleh Indonesia, kebutuhan akan alutsista tentu memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit melihat potensi ancaman yang dihadapi. Namun, pada kenyataannya Indonesia terkendala dalam mengalokasikan anggaran belanja militer, dimana menurut Stockholm International Peace Research Institute, belanja militer Indonesia dibanding dengan PDB terus mengalami penurunan sejak 1988 hingga 2019 (detikfinance, 2020)

Anggaran untuk belanja militer yang dimiliki oleh Indonesia pada 2019 hanya sebesar 0,7% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam yang mengalokasikan 3,3% pada 2019 dari PDB mereka untuk anggaran belanja militer, Singapura 3,2%, Kamboja 2,3%, Thailand 1,3%, Malaysia dan Filipina 1% (detikfinance, 2020), sehingga dapat dilihat bahwa alokasi belanja militer Indonesia menjadi salah satu yang terkecil di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2021, anggaran untuk fungsi pertahanan mendapatkan porsi terbesar kedua di RAPBN 2021 yaitu sebesar Rp. 136,9 triliun. Meski demikian, menurut Muradi (Saubani, 2020), besarnya anggaran tersebut masih belum memenuhi angka optimal antara 1,5-2% dari PDB atau sekitar 350-400 triliun. Dengan keterbatasan anggaran belanja militer yang dimiliki, Indonesia diharuskan untuk mampu memaksimalkan penggunaannya, termasuk didalamnya yang diperuntukkan untuk belanja alutsista.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan, Indonesia harus membangun industri pertahanannya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan akan alutsista. Membangun industri pertahanan nasional memerlukan berbagai macam upaya serta kerja sama berbagai pihak. Kerja sama ini dapat berupa antar instansi pemerintah, BUMN, universitas, swasta, atau dengan negara lain. Kerja sama dengan negara lain untuk membangun industri pertahanan nasional salah satunya dapat terjadi melalui pembelian alutsista yang didalamnya terdapat klausul *transfer of technology*, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Kemandirian dalam alat utama sistem senjata atau alutsista dapat dikategorikan menjadi dua: kemandirian secara kebijakan serta kemandirian secara pemenuhan akan kebutuhan alutsista. Kemandirian secara kebijakan berarti Indonesia bebas dalam menentukan apa dan bagaimana tindakan yang diambil dalam menggunakan alutsista yang dimiliki tanpa didikte oleh

negara lain, sesuai dengan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kemandirian kedua adalah dalam hal produksi alutsista, dimana Indonesia diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsistanya secara mandiri dengan mengandalkan industri pertahanan dalam negerinya.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2012, setiap pengadaan alutsista yang berasal dari negara lain, diwajibkan memuat unsur kerja sama didalamnya. Salah satu negara yang melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia adalah Korea Selatan, yang sejak 2006 telah menjalani kerja sama komprehensif yang tertuang dalam sebuah Perjanjian Kemitraan Strategis *Join Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*. Dalam perjanjian tersebut salah satunya memuat kerja sama pertahanan dan keamanan (Armandha e. a., 2016). Pada tahun 2010, Indonesia memperoleh ajakan Korea Selatan untuk bekerja sama dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Indonesian Fighter Experiment/Korean Fighter Experiment (IFX/KFX)*.

Memorandum of Understanding (MoU) tentang proyek IFX.KFX antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea ditandatangani pada 15 Juli 2010 yang berisikan kesepakatan mengenai pengembangan bersama berikut dengan penelitian, produksi dan pemasaran untuk membangun pesawat tempur yang memiliki kemampuan *multi-role* generasi 4.5 (Armandha e. a., 2016). Dimana dalam MoU tersebut juga disepakati bahwa Korea Selatan akan menanggung 80% dan Indonesia sebesar 20% dari total biaya yang diperlukan.

Selain proyek IFX/KFX, Indonesia juga membeli 3 unit kapal selam DSME-209 pada tahun 2011. Dimana dalam kontrak pembelian kapal selam tersebut, 1 dari 3 unit terakhir yang dibeli oleh Indonesia akan diproduksi oleh PT. PAL Surabaya (Al-Fadhat & Effendi, 2019).

Kapal Selam DSME-209 merupakan varian kapal selam U-209 produksi Jerman yang lisensinya dibeli oleh Korea Selatan. Pengadaan alutsista ini telah selesai dan unit terakhir seperti yang telah disepakati dibangun di galangan kapal milik PT. PAL Surabaya dan telah diserahkan ke TNI pada Desember 2020.

Kedua kerja sama di atas antara Indonesia dengan Korea Selatan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Kerja sama tersebut bertujuan agar kemandirian alutsista Indonesia dapat terwujud sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, yang berarti Indonesia akan terbebas dari kekhawatiran embargo oleh negara produsen seperti yang pernah dialami sebelumnya. Dengan pengetahuan, pengalaman, serta teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan yang telah bekerja sama dengan beberapa produsen alutsista di berbagai negara, ini bisa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan motivasi yang dimiliki oleh suatu negara dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Donald. E. Nuechterlein yang mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “*the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment*”. Hal tersebut berarti bahwa kepentingan nasional merupakan ekspresi atas kebutuhan dan keinginan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang menjadi lingkungan eksternal dari suatu negara, yaitu Indonesia bekerja sama

dengan Korea Selatan dilandaskan akan kebutuhan yang ingin dicapai melalui kerja sama tersebut: kepentingan nasional Indonesia dan Korea Selatan.

Kerja Sama Internasional

Konsep kerja sama internasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana kedua negara mencapai kepentingan nasional mereka. Kerja sama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama (Zulkifli, 2012). Sehingga negara-negara akan menjalin kerja sama untuk menghadapi masalah-masalah bersama-sama. Sehingga, dalam kasus ini dimana Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama dikarenakan keduanya memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun industri pertahanan mereka agar dapat mandiri.

Military Industrial Complex

Terdapat perbedaan yang signifikan atas konsep *military industrial complex* pada negara maju dan berkembang. Di Amerika Serikat sebagai contoh negara maju, konsep *military industrial complex* memiliki kecenderungan akan pengejaran keuntungan (komersialisasi) terhadap hasil industri pertahanan. Hal itu dikarenakan peranan swasta (industri pertahanan) yang lebih besar ketimbang dengan negara. Hal ini memungkinkan untuk ruang-ruang bagi pelaku industri pertahanan untuk melakukan lobi-lobi terhadap parlemen agar dapat menguntungkan industri mereka. Sementara itu untuk negara berkembang konsep *industrial military complex*, negara dalam hal ini pemerintah bersama legislator memiliki lebih banyak pengaruh, sehingga kedaulatan dan kemandirian industri pertahanan akan lebih diutamakan (Armandha e. a., 2016). Sehingga, konsep ini akan menjelaskan bagaimana peranan aktor-aktor

yang berpengaruh dalam proses membangun kemandirian industri pertahanan dan pada akhirnya mencapai kepentingan nasional negara.

PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara dapat dilihat dari beberapa faktor penentu seperti kondisi geografis, kondisi demografis, sumber kekayaan alam, serta kondisi sosial seperti kemampuan keuangan negara tersebut. Indonesia dan Korea Selatan memiliki kondisi yang berbeda dari faktor penentu tersebut. Namun, kedua negara mampu menjalin hubungan kerja sama dibidang pertahanan yang baik berkat kesamaan mereka terhadap satu hal: kepentingan nasional. Kepentingan nasional seperti yang diungkapkan oleh Donald. E. Nuechterlein yang mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “*the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment*” (Nuechterlein, 1976).

Kepentingan nasional menjadi suatu alat untuk tindakan politik yang menjustifikasi apa yang dilakukan oleh negara demi menjamin apa yang terbaik bagi bangsa dan negaranya (Nurrohman e. a., 2019). Indonesia dalam konstitusinya memiliki kepentingan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konstitusi ini yang kemudian menjadi landasan politik luar negeri Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain.

Korea Selatan secara geografis dikelilingi oleh berbagai kekuatan besar dunia. Di sebelah barat mereka terdapat Republik Rakyat Tiongkok, Rusia di barat laut, Jepang di tenggara, Taiwan di selatan, serta Korea Utara yang telah menjadi ancaman pertahanan nasional Korea Selatan sejak kedua negara berperang satu sama lainnya dalam Perang Korea. Kondisi ini

membuat Korea Selatan menempatkan pertahanan dan keamanan negara menjadi prioritas mereka dalam menjalankan politik luar negeri maupun domestiknya. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mewajibkan warga negaranya untuk mengikuti program bela negara atau yang disebut dengan wajib militer. Didukung oleh kemampuan finansial yang mumpuni menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan yang diperhitungkan di kancah regional maupun internasional.

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan dibidang pertahanan berjalan dengan dinamika positif. Peningkatan hubungan diplomatik dari *strategic partnership* menjadi *special strategic partnership* membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan militer dan pertahanan kedua negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kerja sama pengadaan alutsista dari Korea Selatan untuk Indonesia seperti pembelian Panser Tarantula untuk TNI AD, Kapal Selam Changbogo Class untuk TNI AL, dan pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle serta pesawat latih ringan KT-1B untuk TNI AU. Dari sisi Korea Selatan, juga membeli alutsista dari Indonesia berupa pesawat CN-235 untuk Angkatan Udara Korea Selatan/ROKAF dan Korean Coast Guard mereka sebagai bentuk imbal dagang (Kemlu, 2021).

Hubungan kedua negara tersebut dapat dijelaskan dengan konsep kerja sama internasional. Kerja sama internasional menurut Kenneth Oye akan membentuk suatu "*Payoff Structure*" yang mengandung makna bahwa segala tindakan yang dipilih oleh negara dalam menjalankan interaksinya dengan negara lain akan menghasilkan dua bentuk relasi: harmoni atau penghianatan. Ia berpendapat bahwa pemberian sanksi atau insentif yang tepat untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dan menghindari situasi yang saling menghianati.

Lebih lanjut, model “*Payoff Structure*” mengharuskan negara untuk menempuh tiga macam strategi: strategi unilateral, bilateral dan multilateral. Strategi unilateral yakni melakukan tindakan kooperatif untuk mendapatkan insentif berupa kerja sama dan mengurangi kecenderungan kecurangan dari partner kerja sama. Strategi bilateral, yakni menawarkan suatu insentif dan meminta insentif balasan dari partner kerja sama sehingga terbentuklah kerja sama yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah strategi multilateral, yakni menginisiasi dan sekaligus mempengaruhi pembentukan rezim internasional dengan insentif dan sanksi yang jelas untuk menciptakan harmoni dalam kerja sama antar negara.

Strategi bilateral ini yang dapat menggambarkan hubungan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan. Eratnya hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara didukung dengan sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing, disamping proses kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang sangat baik sehingga membuka peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar (Kemlu, 2021). Kondisi ini memungkinkan untuk keduanya saling menawarkan dan meminta insentif sehingga membentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam kerja sama bidang pertahanan, Korea Selatan melalui Minister of Defence Acquisition Program Administration (DAPA), Jeon Jei-guk, pada pertemuan ke 7 Komite Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan menyatakan bahwa kerja sama di bidang industri pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan kerja sama tingkat paling tinggi di bidang pertahanan (Kemhan, 2018). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan partner terbaik bagi Korea Selatan. Kerja sama industri pertahanan terbesar yang terjalin oleh Indonesia dan Korea Selatan sejauh ini adalah proyek pengembangan bersama

pesawat tempur KFX/IFX serta akuisisi tiga unit Kapal Selam DSME U-209/1400 Changbogo Class oleh Indonesia.

Dalam proyek KFX/IFX, Armandha dkk menjelaskan kepentingan Indonesia dan Korea Selatan dalam proses akuisisi program pengembangan pesawat tempur tersebut. Dalam penjelasannya, ia membaginya ke dalam dua aspek: aspek sistemik dan aspek institusional. Aspek sistemik Korea Selatan adalah keinginan mereka untuk membangun pesawat tempur sendiri yang memiliki kemampuan *stealth* yang tinggi guna menghadapi kekuatan tempur Korea Utara yang sering mengancam keamanan Korea Selatan. Pada 2010 menjadi puncak ancaman tersebut ketika Korea Utara melancarkan serangan ke Pulau Yeonpyeong. Maka dari itu, transformasi teknologi militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dibangun agar dapat menyesuaikan dengan ancaman yang datang dari tetangga utaranya tersebut (Armandha e. a., 2016).

Aspek selanjutnya yakni aspek institusional, yaitu upaya Korea Selatan untuk membangun pertahanan diri (*self-defense*) mereka. Hal ini berkaitan dengan respon internal Korea Selatan terhadap kondisi sistemik eksternal yang mengelilinginya. Proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX merupakan salah satu bentuk respon internal Korea Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan mereka yang telah dimulai sejak era 1990an. Ancaman Korea Utara, meningkatnya kekuatan militer negara-negara kuat di kawasan seperti Tiongkok dan Jepang, menambah situasi dilema keamanan yang dialami oleh Korea Selatan (Armandha e. a., 2016).

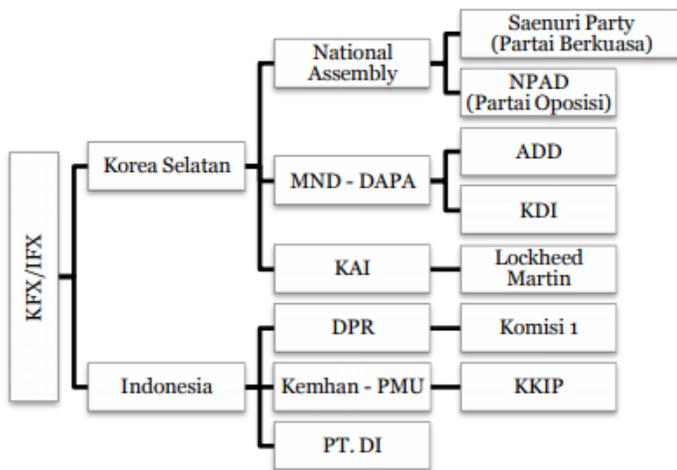
Dari sisi Indonesia, E. Haryanto (Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI) mengungkapkan bahwa terdapat tiga motivasi utama Indonesia dalam menerima tawaran Korea Selatan dalam proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX (Armandha e. a., 2016).

Pertama, untuk membangun kemandirian di bidang pertahanan. Pengalaman pahit Indonesia di masa lalu akibat embargo yang dijatuhkan oleh pihak Barat menggambarkan kondisi bahwa meskipun Indonesia memiliki dana untuk membeli alutsista, belum tentu Indonesia dapat menggunakan alutsista tersebut secara leluasa. Kedua adalah motivasi teknologi, dimana Indonesia masih sangat minim dalam hal teknologi pertahanan. Sehingga pengembangan bersama Korea Selatan ini diharapkan untuk memungkinkan terjadinya transfer teknologi ke Indonesia. Yang terakhir adalah kontribusi terhadap perekonomian. Proyek yang menggunakan anggaran besar ini diharapkan mampu menyerap lapangan kerja yang besar di masa depan ketika kemandirian industri pertahanan Indonesia telah tercapai.

Indra Nurrohman dkk menjelaskan bahwa kepentingan Indonesia untuk melakukan *strategic partnership* dengan Korea Selatan ialah terwujudnya kemandirian industri pertahanan Indonesia serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan MEF TNI (Nurrohman e. a., 2019). Dalam proyek KFX/IFX, Indonesia menargetkan untuk dapat memproduksi dan memiliki minimal 3 skuadron pesawat tempur hasil dari proyek tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan bersama KFX/IFX merupakan salah satu bentuk pemenuhan kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan (Nurrohman e. a., 2019).

Proyek pengembangan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan melibatkan berbagai aktor dalam proses akuisisi dan pengembangannya. Pemerintah Korea Selatan menunjuk perusahaan Korean Aerospace Industry (KAI) sebagai kontraktor yang memenangkan kontrak proyek pengembangan pesawat tempur nasional mereka. Sekretaris I Kedutaan Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia, Jeoung Gi-young, mengatakan bahwa KAI dipilih karena menjadi satu-satunya perusahaan dalam negeri yang mampu menyanggupi ketentuan yang diminta oleh pemerintah Korea Selatan, mengalahkan Korean Airlines (Armandha e. a., 2016).

KAI dalam pengembangan KFX/IFX menggandeng Lockheed Martin (AS) untuk menjadi sumber transfer teknologi yang akan dibutuhkan dalam pengembangan KFX/IFX. Hal ini didasari oleh sejarah hubungan antara kedua perusahaan dalam pengembangan pesawat tempur latih T-50 Golden Eagle. Selain itu, Korea Selatan juga berhak untuk memperoleh 25 teknologi inti dari Lockheed Martin yang berasal dari pesawat F-35 JSF mereka yang dibeli oleh Korea Selatan sebagai bentuk *offsetnya* (Armandha e. a., 2016). Teknologi tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam KFX/IFX.



Bagan4.1 Military Industrial Complex Proyek KFX/IFX. Sumber: Sammy Tyar Armandha dkk, 2016.

Aktor-aktor lain yang juga terlibat dalam proyek pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di atas. Dari sisi Korea Selatan, badan yang bertugas untuk memimpin proyek tersebut ialah Defence Acquisition Program Administration (DAPA), sebuah agen yang dibentuk pada 1 Januari 2006 yang ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan untuk urusan akuisisi dan pengadaan persenjataan serta pengembangan industri pertahanan Korea Selatan. DAPA bertanggungjawab atas pengembangan dan pengadaan persenjataan untuk militer Korea Selatan setelah pihak militer memberikan proposal kebutuhan alutsistanya.

DAPA memiliki peran yang sangat besar dalam industri pertahanan Korea Selatan. Mereka berperan dalam semua proses mulai dari penelitian dan pengembangan (R&D), penyusunan estimasi anggaran, pembelian, hingga proses uji coba produk alutsista. Untuk urusan penelitian awal dalam rangka mengembangkan teknologi pertahanan, DAPA dibantu oleh Agency for Defense Development (ADD) dan Korean Development Institute (KDI) yang merupakan lembaga *think tank* Korea Selatan di bidang pertahanan, pembangunan ekonomi dan sosial.

Aktor selanjutnya yang juga memiliki kepentingan dan peranan dalam proyek KFX/IFX adalah parlemen atau regulator. Di Korea Selatan parlemen disebut sebagai *National Assembly*. Aktor ini bertugas sebagai penentu besaran anggaran yang akan dikeluarkan oleh eksekutif/pemerintah. Parlemen berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait proyek negara, termasuk mereka bisa meminta melakukan peninjauan ulang terhadap suatu proyek jika dianggap terjadi masalah dalam prosesnya. Fungsi penganggaran serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut adalah peran utama dari aktor ini dalam *military-industrial complex*.

Dari sisi Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia (DI) ditunjuk oleh pemerintah sebagai kontraktor yang terlibat dalam proyek KFX/IFX bersama Korea Selatan. DI merupakan perusahaan nasional satu-satunya yang bergerak di bidang kedirgantaraan yang berdiri sejak 1976. DI telah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis pesawat terbang propeler dan juga helikopter. Produk-produk hasil produksi PT. DI diantaranya ialah pesawat CN-235, N219, dan Helikopter Super Puma. PT. DI telah menjadi sub-kontraktor yang memasok kebutuhan perusahaan-perusahaan industri dirgantara internasional. Namun, PT. DI belum memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membangun pesawat berbasis mesin jet seperti seperti pesawat tempur.

Selanjutnya ialah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite ini dipimpin langsung oleh presiden, didalamnya terdapat lima menteri kabinet terkait, yaitu Menteri Pertahanan sebagai *leading sector*, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, serta Menteri Keuangan (Purwanto, 2020). KKIP memiliki tugas pokok untuk membina industri pertahanan dalam negeri. Komite tersebut juga menyusun rencana induk dan ceta biru industri pertahanan yang mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan keberadaan PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad, dan PT. PAL. KKIP juga berkontribusi membentuk *master plan* revitalisasi industri pertahanan, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alutsista TNI dan Polri, serta verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN industri pertahanan.

Badan legislasi di Indonesia memiliki peran yang relatif sama dengan parlemen Korea Selatan. DPR RI khususnya Komisi I yang melingkupi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, memiliki fungsi legislasi (pembentukan undang-undang), penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif/pemerintah. Yang membedakan antara DPR RI dan Parlemen di Korea Selatan, Indonesia menganut sistem negara presidensial sehingga tidak mengenal istilah partai berkuasa dan partai oposisi, berbeda dengan Korea Selatan yang menganut sistem parlementer sehingga terdapat pihak pemerintah dan oposisi di parlemen mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membangun postur pertahanan minimumnya dilakukan dengan mengakuisisi 3 unit kapal selam DSME 209/1400 dari Korea Selatan. Kesepakatan yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut mencantumkan skema transfer teknologi didalamnya. Hal ini tidak lain merupakan amanat dari UU No. 16 Tahun 2012 tentang

Industri Pertahanan, dimana dalam UU tersebut mewajibkan adanya klausul *offset* pertahanan dalam setiap pembelian alutsista dari negara lain.

Kapal selam telah menjadi alutsista yang diandalkan oleh berbagai negara di dunia untuk pertahanan negaranya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Perang Dunia II dimana kapal selam digunakan untuk memburu dan menghancurkan kapal permukaan milik musuh dengan efektif. Maka dari itu kapal selam mampu memberikan efek *gentar/deterrence effect* yang efektif untuk musuh. *Stealth, covert, and asymmetric* menjadi strategi pertempuran yang diandalkan oleh kapal selam karena ia memberikann keuntungan terhadap akses di laut secara tidak langsung memberikan banyak keuntungan yang dapat menghasilkan kemenangan serta memberikan efek besar kepada musuh, serta lebih superior daripada kapal perang lainnya (Al-Fadhat e. a., 2019).

Melihat betapa startegisnya kapal selam bagi pertahanan suatu negara, negara-negara kemudian berlomba untuk mampu menguasai teknologi kapal selam tersebut. Pada awalnya hanya negara-negara kekuatan utama yang menguasai teknologi kapal selam, namun berkat program kerja sama dengan negara-negara tersebut, beberapa negara lainnya juga akhirnya mampu membuat dan menguasai teknologi kapal selam tersebut, seperti halnya Korea Selatan. Mereka mampu menguasai teknologi kapal selam berkat kerja sama mereka dengan Jerman. Berkaca dari hal tersebut, Indonesia melalui industri pertahanan dalam negerinya berkeinginan untuk menguasai teknologi kapal selam juga.

Penelitian oleh Prasetyo mengemukakan alasan mengapa Indonesia menginginkan untuk menguasai teknologi kapal selam. Dalam wawancaranya dengan Kepala Bidang Alih Teknologi dan Offset KKIP, Laksamana Muda (Purn) Rachmad Lubis, ia mengatakan bahwa kapal selam telah menjadi salah satu dari tujuh program nasional. Hal ini karena upaya pertahanan negara yang didukung kehadiran kapal selam memiliki daya penangkalan yang sangat tinggi karena

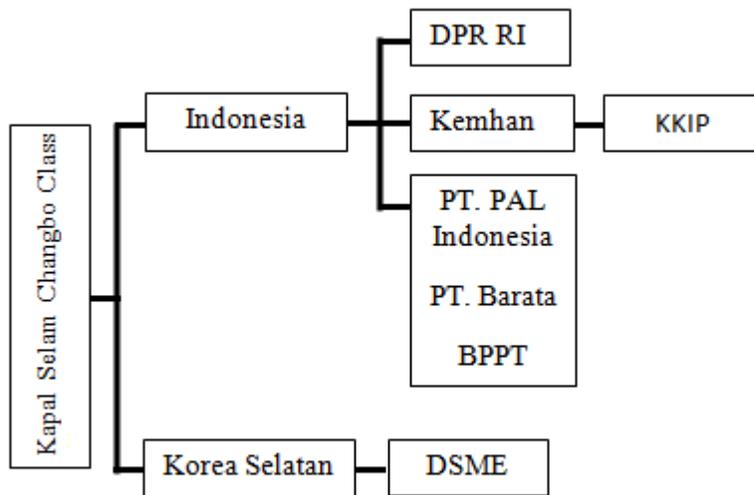
sifatnya yang sulit dideteksi, sehingga kapal selam memiliki kemampuan strategis, oleh karena itu Indonesia perlu kembangkan sendiri (Prasetyo, 2017). Kemudian Staff Ahli KKIP Bidang Sistem Pertahanan Negara, Mayor Jenderal TNI (Purn) Judy Harianto, menambahkan bahwa kapal selam yang diperoleh dengan hanya membeli dari negara produsen saja memang memiliki daya tangkal yang tidak, akan tetapi tidak semutlak dengan kapal selam yang diproduksi sendiri oleh Indonesia. Hal itu karena jika kapal selam diproduksi secara mandiri, negara lain tidak akan tahu berapa jumlah pasti kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga mereka tidak akan tahu kemampuan pasti pertahanan Indonesia (Prasetyo, 2017).

Dari sisi Korea Selatan, kepentingan yang dikejar dalam kerja sama dengan Indonesia terkait dengan pembelian kapal selam Changbogo Class ialah kelangsungan industri pertahanan dalam negerinya. Daewoo Shipbuilding Marine and Engineering (DSME) merupakan perusahaan nasional milik Korea Selatan yang memenangkan proyek tender pengadaan kapal selam Indonesia pada anggaran Renstra I dan II. Nilai kontrak pembelian tersebut adalah sebesar 1,1 milyar dolar AS dan menjadi kontrak pembelian terbesar yang diterima oleh Korea Selatan dalam bidang alutsista. Hal tersebut tentunya menjadi pundi-pundi devisa bagi Korea Selatan. Indonesia sendiri berencana untuk menambah lagi jumlah kapal selamnya menjadi 12 unit pada 2024 mendatang, hal ini tentu menjadi peluang yang bagus untuk Korea Selatan apabila proyek 3 unit ini dapat berhasil, maka kemungkinan besar mereka akan kembali memenangkan tender penambahan kapal selam Indonesia tersebut.

Mekanisme kejasama Indonesia – Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam Changbogo Class menjadi bahasan yang akan membahas peran setiap aktor yang terlibat didalam kerja sama tersebut. Kerja sama pembangunan kapal selam antara Indonesia dan Korea Selatan dilaksanakan dalam satu kontrak perjanjian pengadaan kapal selam Nomor:

TRAK/1495/XII/2011/AL yang ditandatangani pada 20 Desember 2011 (Prasetyo, 2017). Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa hal itu berdasarkan kebutuhan TNI AL yang dianggarkan sebesar 1,1 milyar dolar AS yang dianggarkan ke dalam dua renstra, yakni Renstra I (2004-2009) sebesar 350 juta dolar AS dan Renstra II (2010-2014) sebesar 730 juta dolar AS.

Dari mekanisme pembelian kapal selam Changbogo Class oleh Indonesia yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Aktor-aktor tersebut dapat dirangkum melalui bagan di bawah ini.



Bagan 4.2 Military Industrial Complex Proyek Kapal Selam Changbogo Class. Diolah sendiri.

DPR RI khususnya komisi I memiliki peran penganggaran dalam proyek ini. Seperti diketahui bahwa proses akuisisi tiga unit kapal selam Changbogo Class menggunakan anggaran pada dua Renstra, dimana Renstra tersebut disepakati tiap tahunnya antara pemerintah bersama dengan DPR RI. KKIP berperan untuk membentuk *master plan* revitalisasi industri pertahanan, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alutsista TNI dan Polri, serta verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN industri pertahanan.

Relasi *military-industrial complex* yang terjalin dalam kerja sama pembangunan kapal selam Changbogo Class berbeda dengan yang terdapat pada proyek pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX oleh Korea Selatan dan Indonesia. Perlu diketahui bahwa proyek kapal selam Changbogo Class Indonesia merupakan hasil dari pembelian/ *procurement* produk yang sudah ada atau telah mampu diproduksi oleh Korea Selatan, berbeda dengan proyek KFX/IFX dimana masih dalam tahap pengembangan bersama atau dengan kata lain belum diproduksi secara massal oleh Korea Selatan. Sehingga, aktor yang terlibat dalam proyek kapal selam Changbogo Class lebih sedikit ketimbang dengan aktor yang terdapat pada proyek KFX/IFX. Meskipun secara relasi, antara pemerintah, regulator dan industri pertahanan tetap memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam proyek kapal selam ini.

Dari proyek pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX, Indonesia juga telah memperoleh berbagai manfaat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya tenaga ahli Indonesia yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Pada 2018 lalu, PT. Dirgantara Indonesia mengirimkan 28 tenaga ahli ke Korean Aerospace Industry pada bulan Januari, serta mengirimkan lagi 44 orang tenaga ahli pada bulan Desember (Nurrohman e. a., 2019). Sehingga total tenaga ahli yang dikirimkan oleh Indonesia ke Korea Selatan untuk proyek KFX/IFX mencapai 72 orang. Tenaga ahli tersebut terlibat dalam fase *Engineering and Manufacturing Development* (EMD). Pengembangan bersama pesawat tempur antara Indonesia dan Korea Selatan ini pada akhirnya membawakan hasil dimana pada April 2021 prototipe pertama pesawat ini diluncurkan dan diberi nama resmi KF-21 Boramae. Dalam peluncuran tersebut hadir Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden Korea Selatan.

Persiapan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan berkat proses transfer teknologi yang mulus. Dalam kurun waktu 2014-2018, level

kesiapan teknologi untuk pesawat KFX/IFX meningkat 2 level menjadi level 4. Level kesiapan teknologi atau *Technology Readiness Level* (TRL) merupakan kriteria kesiapan teknologi suatu industri pertahanan dalam memproduksi yang terdiri dari 9 level atau tingkatan. TRL diawali pada level pertama sebagai tingkatan paling bawah dalam kesiapan teknologi, kemudian level 9 yakni tingkatan suatu alutsista teruji melalui misi maupun operasi (Nurrohman e. a., 2019).

Dalam wawancara dengan Humas PT. PAL Indonesia, disebutkan bahwa kapal selam Alugoro-405 merupakan kapal selam karya anak bangsa yang dibangun di Fasilitas Kapal Selam PT. PAL Indonesia dengan lingkup pekerjaan *Joint Section, test and trials* (*Setting to work, Hydro Test, Harbour Acceptance Test, Sea Acceptance Test*, termasuk *pre-Sea Acceptance Test* hingga penyusunan *working standard* oleh PT. PAL Indonesia. Proses *joint section* pembangunan kapal selam Alugoro-405 ini, PT. PAL Indonesia berhasil menyelesaikannya dengan predikat *zero defect*. (Wawancara dengan Humas PT. PAL Indonesia pada 27 April 2021).

Keberhasilan proyek kapal selam Alugoro-405 menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia, dimana berhasil menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Disamping keberhasilan tersebut, PT. PAL Indonesia juga telah mampu untuk melakukan berbagai perawatan terhadap alutsista matra laut. Dari wawancara dengan Humas PT. PAL Indonesia disebutkan bahwa PT. PAL Indonesia telah mampu melakukan Pemeliharaan Tingkat Menengah (Harmen) terhadap salah satu kapal selam Indonesia yakni Nagapasa-403. Harmen yang dilakukan meliputi sistem bangunan kapal, sistem pendorongan, sistem navigasi dan bahari, navigasi, sistem penginderaan, serta sistem senjata. PT. PAL Indonesia yang berhasil membangun dan memelihara kapal selam Indonesia menunjukkan kapabilitas PT. PAL Indonesia

secara utuh sebagai galangan yang memiliki kemampuan pembangunan dan pemeliharaan kapal selam.

PENUTUP

1. Kepentingan Indonesia dalam kerja sama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan adalah untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional, pengejaran akan ketertinggalan teknologi alutsista, serta untuk memenuhi kebutuhan *minimum essential forces* TNI. Korea Selatan dalam kerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan memiliki kepentingan untuk memasarkan produk industri pertahanan mereka, secara sistemik Korea Selatan menginginkan untuk menguasai teknologi canggih untuk alutsista buatan nasional mereka, serta untuk membangun pertahanan diri (*self defense*) dari ancaman eksternal terutama dari Korea Utara.
2. Pengaruh kerja sama industry pertahanan Indonesia – Korea Selatan terhadap kemandirian alutsista Indonesia dalam proyek KFX/IFX adalah berkontribusi terhadap peningkatan level kesiapan teknologi atau *Technology Readiness Level* (TRL) yang dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia, yaitu meningkat 2 level menjadi level 4 dari 9 level TRL. Dalam proyek kapal selam Changbogo Class, pengaruh kerja sama Indonesia – Korea Selatan adalah Indonesia berhasil membangun kapal selam pertama yaitu KRI Alugoro-405 dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam, selanjutnya adalah PT. PAL Indonesia telah mampu melakukan Pemeliharaan Tingkat Menengah (Harmen) terhadap kapal selam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bitzinger, Richard A., (2009). *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. California: ABC CLIO.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burchill, S. (2005). *The national interest in international relations theory*. Springer.
- Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan dan Isu-isu Strategis Global*. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- Burhanuddin (2019). *Kajian Pasifik Barat Daya*. Makassar: Unhas Press.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Hartanto, A. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. (2005) *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015) *Indonesia Defence White Paper*.
- Olton, R, Plano J.C. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A Bardin.
- Widjayanto, A. (2012). *Kemandirian Industri Pertahanan*. Jakarta: Kompas.

JURNAL, DOKUMEN, MAKALAH, DAN ARTIKEL

- Al-Fadhat, F., & Effendi, N. N. A. Kerja sama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373-392.
- Armandha, S. T., Sumari, A. D. W., & Rahmadi, H. B. (2016). Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX. *Global Strategis*, 10(1), 75-94.
- Bitzinger, R. A. (2017). Southeast Asia's naval shipbuilding industry: Challenges ahead. *Singapore: RSIS Publication*.
- Clackson, A. (2011). Conflict and cooperation in international relations. *E-International Relations*, [http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-internationalrelations/\(30.11.2017\)](http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-internationalrelations/(30.11.2017)).

- Dunne, J. P., & Sköns, E. (2010). The military industrial complex. *The Global Arms Trade: A Handbook*. London: Routledge London, 281-292.
- Grizold, A. (1994). The concept of national security in the contemporary world. *International Journal on World Peace*, 37-53.
- Manafe, C., Swastanto, Y., & Pedrason, R. (2020). INDONESIA AND SOUTH KOREA DEFENSE DIPLOMACY: CASE STUDY OF PROCUREMENT OF CHANG BOGO CLASS VESSELS IN 2010-2018. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(2), 162-173.
- Milner, H. (1992). International theories of cooperation among nations: Strengths and weaknesses.
- Mintz, A. (1985). The military-industrial complex: American concepts and Israeli realities. *Journal of Conflict Resolution*, 29(4), 623-639.
- Moskos Jr, C. C. (1974). The concept of the military-industrial complex: radical critique or liberal bogey?. *Social Problems*, 21(4), 498-512.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Nurrohman, I., Gunawan, D., & Sumarlan, S. (2019). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Implementasi Kebijakan Kerja Sama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan. *Diplomasi Pertahanan*, 5(1).
- Paulo, S. (2014). International cooperation and development: A conceptual overview. *German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Discussion Paper*, 13.
- Poetri, D. A., Govindasamy, G., & Akhir, M. N. M. (2018). Republic of Korea-Indonesia Relations: Middle Power Diplomacy in East Asia. *IJEAS: The International Journal of East Asian Studies*, 7(1), 59-77.
- Prasetyo, T., Armawi, A., & Salim, D. A. (2017). Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerja sama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 86-103.
- Rundquist, B. S. (1978). On testing a military industrial complex theory. *American Politics Quarterly*, 6(1), 29-53.
- Wicaksono, T., & Perwita, A. A. B. (2020). The Military Industrial Complex In a Developing Country: Lessons from the Republic of Turkey. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 53-67.
- Bustaman, A. I. (2019). Peranan PT. PINDAD Dalam Pengembangan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia.

Putera, E.W. (2018). Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Retrieved from <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/#:~:text=Dalam%20konstitusi%20tersebut%2C%20kepentingan%20nasional,kemerdekaan%2C%20perdamaian%20abadi%20dan%20keadilan>

Tim Detik.com-Detikfinance. (2020). Sebesar Apa Anggaran Kemhan RI dibanding Negara Tetangga?. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5099470/sebesar-apa-anggaran-kemhan-ri-dibanding-negara-tetangga>

Saubani, A. (2020). Anggaran (Besar) Pertahanan untuk Kementerian Prabowo. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qh871d409/anggaran-besar-pertahanan-untuk-kementerian-prabowo>

Bab 7. https://www.bappenas.go.id/files/4913/5078/6556/bab-7_20090202204616_1756_8.pdf

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan